JURNAL

ISSN 2303-0313

MANAJEMEN &BISNIS

Kajian Ilmu Akutansi dan Manajemen Bisnis

Volume VIII No 2 Desember 2020

EFEKIVITAS PENGUKURAN LIKUIDITAS DALAM MENILAI PENERIMAAN DAERAH
(Study Kasus Kabupaten Marauke)
Enggar Trijunanto, SE.,M.Ak

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN
Metodius F.M Janggur

ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE
Fidelis Yamboya

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KTP ELEKTONIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPALA LIMA DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE
Petronela Bebhe Leo

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
(Studi Kasus Pada Perusahaan Dareah Air Minum (PDAM) Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke)
Servandus Samderubun

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke
Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua 10130. Tel. (0971)333501 Email: stie.theresa@gmail.com

JURNAL ISSN 2303-0313

MANAJEMEN &BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.M

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik. Pandiangan, S.Kom., M.M

Wakil ketua : Inez Cara A. Phoek, B.Com.M.M

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M
Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:
Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501
Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4 Daftar Isi

EFEKIVITAS PENGUKURAN LIKUIDITAS DALAM MENILAI PENERIMAAN DAERAH (Study Kasus Kabupaten Marauke) 5
Enggar Trijunanto, SE.,M.Ak

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN 27
Metodius F.M Janggur

ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE 39
Fidelis Yamboya

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KTP ELEKTONIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEPALA LIMA DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE 71
Petronela Bebhe Leo

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Dareah Air Minum (PDAM) Kelurahan Mandala Kabupaten Merauke) 87
Servandus Samderubun

ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI PASAR WAMANGGU KABUPATEN MERAUKE

DISUSUN OLEH: FIDELIS YAMBOYA
NIM.15632009

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di pasar wamanggu kabupaten merauke.

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskripsi bertujuan untuk menggambarkan obyektif data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Berdasarkan analisa hasil penelitian dengan menggunakan analisa swot, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat bentuk komunikasi persuasif antara Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu dengan para pelaku parkir liar, yaitu bentuk komunikasi yang bersifat ajakan bertujuan untuk mempengaruhi para pelaku parkir liar agar mau dibina oleh pihak Dinas Perhubungan.

Faktor Penghambat penghambat yaitu masih kurangnya lahan parkir dan susahnya merangkul (oknum) jukir liar untuk dijadikan jukir binaan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu.

Adapun yang diukur dalam melakukan analisa swot adalah bukti Langsung *(tangibles)*, Kehandalan *(realbility)*, Daya Tanggap *(responsiveness)*, Jaminan *(assurance)*, Empati *(emphaty)*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa Bukti Langsung, Kehandalan, dan Daya Tanggap mendapat penilaian terbaik dari masyarakat. Sedangkan untuk Jaminan dan Empati kualitas pelayanannya masih rendah dan kurang baik serta kurang mendapat dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Analisa SWOT, Strategi, Parkir.

1. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut di cermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak

pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Pattiasina, 2011 : 35).

Kabupaten Merauke merupakan Kabupaten paling timur di Wilayah Negara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Papua New Guine di bagian timur dan Australia di bagian selatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merauke yang berada dalam wilayah administratif kabupaten merauke, dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 225.714 Jiwa dan jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke pada tahun 2017 mencapai 71.519 Unit. Bertambahnya jumlah kendaraan akan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatin dari Pemerintah Daerah.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang terus meningkat naik, membuat tingkat kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat, khususnya di kebutuhan sekunder membuat pemerintah harus dengan sikap memecahkan setiap masalah yang terjadi. Dalam hal ini berbicara tentang kebutuhan sekunder, masyarakat selalu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan sekundernya tetapi yang menjadi dilematis dalam pemenuhan kebutuhan sekunder itu adalah tata tertib dari kebutuhan tersebut. Perpakiran menjadi fenomena yang sering di jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat menggangu keindahan kota/kabupaten apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan posistif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat Kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan. Hal ini akan menyebabkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan.

Pembangunan pasar wamanggu merupakan *Urban Renewal* dari perubaha pasar *shopping* menjadi kawasan perbelajaan terpadu. Pembangunan seharusnya membutuhkan lahan yang cukup luas. Tetapi yang terjadi smpai saat ini banyaknya masyarakat yang berbelaja tidak menaati peraturan parkir, dalam hal ini parkir bukan pada tempatnya dan di sembarang tempat bahkan sampai di pinggiran jalan. Kondisi parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas, kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus di tanggapi dengan cepat. Pemerinta Kota/Kabupaten hendaknya Persuasif dan Proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa di nikamti. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini di dinas perhubungan, memerlukan strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kabupaten Merauke khususnya di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penenelitian dengan judul "Analisis SWOT sebagai Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke".

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang

berhubungan dalam menanggulangi parkir liar antara lain :

1. Lahan parkir yang terbatas
2. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
4. Pemanfaatan parkir liar/ilegal
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan tata tertib parkir
6. Sistem pengendalian parkir yang baik dan benar

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan identifakasi masalah maka penulis membatasi masalah pada "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan: Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di pasar wamanggu kabupaten merauke.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   Secara Akademis, penelitian ini di harapkan meningkatkan kajian ilmu pada Strategi Pemerintah Khususnya Parkir Liar Di Pasar Wamanggu.
2. Manfaat Praktis
   Hasil penelitian ini di harapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Merauke Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.

2. LANDASAN TEORI

Dalam memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis memilih beberapa pendapat teori sesuai dengan isi dan tujuan penelitian. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan untuk mendapatkan variabel yang diteliti. Adapun teori yaitu sebagai berikut:

A. Konsep Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu kesempurnaan pemikiran dari berbagai kerangka konsep kerja yang direncanakan strategi (*Framework and Strategic Planning*) guna dapat dilakukan pada perusahaan maupun intansi pemerintahan. Menurut Tripomo, Tedjo, dan Udan (2005:35) suatu analisa strategi harus memperhatikan faktor-faktor SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yakni sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

a) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Tersedianya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
c) Cukup tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung.
d) Adaya kesadaran masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a) Kurang profesionalnya aparatur.
b) Belum membudayakan transparansinya pengelolaan manajemen yang baik.
c) Belum terakumulasinya kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan.
d) Belum tersedianya data yang akurat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Peluang (*Opportunity*)

a) Adanya kesempatan usaha.
b) Adaya perkembangan dari dunia usaha (globalisasi).
c) Tersedianya lintas sektorial.
d) Meningkatnya mobilitas barang dan jasa.
e) Adanya koordinasi antar instansiterkait.

4. Ancaman (*Threat*)

a) Dampak ekonomi yang berkepanjangan.
b) Situasi keamanan yang kurang kondusif.
c) Geografis yang tidak mendukung
d) Komunikasi kurang lancar.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrument dalam pemilihan strategi dasar adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT bisa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan dilingkungan bisinis maupun lingkungan internal perusahaan Kuncoro (2005:50).

Analisis SWOT adalah menemukan berbagai

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Oppurtunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, visi tujuan dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis perusahaan dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut analisis situasi yaitu model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

5. Kegunaan Analisis SWOT

Dari penjelasan mengenai analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat apa saja kegunaan dari analisis SWOT tersebut, seperti dalam (Sondang P, 2002: 99), yaitu:

1. Analisis SWOT berguna sebagai alat bantu pembuatan keputusan dalam pengenalan program-program baru.
2. Merumuskan strategi-strategi dan kebijakan dalam pengelolaan.
3. Alat bantu untuk memperluas visi dan misi suatu organisasi.

6. Matriks SWOT

Tabel 1. Matriks SWOT

Internal / Eksterna	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk Memanfaatkan Peluang
Treats (T)	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2009)

empat alternatif untuk menganalisis SWOT yaitu:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)
   Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Apabila perusahaan atau organisasi mempunyai kelemahan utama pasti akan berusaha menjadikan kelemahan tersebut menjadi kekuatan.
   Jika perusahaan atau organisasi menghadapi ancaman utama, akan berusaha menghindari ancaman jika berkonsentrasi pada peluang yang ada. Maka dalam strategi SO ini akan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)
   Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Strategi WO dapat diterapkan dengan melakukan perekrutan maupun pelatihan staf yang berkemampuan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
3. Strategi ST (*Strength-Treats*)
   Strategi ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari ancaman. Ancaman eksternal sebisa mungkin diminimalisir dengan adanya kekuatan yang ada di perusahaan atau organisasi.

Strategi ini dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Dalam posisi seperti ini, perusahaan atau organisasi disulitkan, karena harus menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan atau organisasi dapat mengatasi keadaan tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah memperkecil kelemahan atau jika memungkinkan dapat menghilangkan kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal yang ada guna pencapaian tujuan.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategos" yang berasaldari "stratos" yang berarti militer dan

'ag'yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagaigeneralshipatau sesuatuyang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untukmenaklukkan dan memenangkan perang *(HusniMubarok, Manajemen Strategi, STAIN Kudus, Kudua, 2009, hlm. 10.)* Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar, strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi,termasukdidalamnyaadalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Menurut porter dalam buku Rangkuti, strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Dari defenisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau teknik yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mempelajari dan memahami lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) sehingga perusahaan bisa tetap bertahan (*survive*). *Craig & Grant*, merumuskan definisi strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objectives*). Menurut Jauch dan Glueck dalam buku Jatmiko, mendefenisikan strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan kerangka yang fundamental pada suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat menyatakan keberlangsungannya, dan pada saat bersamaan dapat bertahan dari lingkungan dan perubahan yang terjadi.

2. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasiuntuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.Berbagai teknik analisis bisnis dapat dgunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST(*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Social-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).PerencanaanStrategis(*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / *strategic planning*. Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategi. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis. Kemampuan manufaktur, harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategi. Bahwa *Strategic Planning* adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan.

3. Perumusan Strategi

Tahapan manajemen strategik diawali dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses memilih Pola Tindakan Utama (strategi) untuk mewujudkan visi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi-misi-

tujuan jangka panjang-swot-strategi. Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa dimulai dari SWOT atau bahkan dari strategi itu sendiri. Namun yang terpenting, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, strategi dan kesesuaian; pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan Peluang-Ancaman yang ada, Kekuatan-Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan (*Misi-Visi-Goal*) yang ingin dicapai.



Gambar 2.1. Strategi dan Kesesuaian

Strategi dirumuskan melalui tahapan utama sebagai berikut: (1) Analisis Arah, yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai organisasi. (2) Analisis Situasi, yaitu tahapan untuk membaca situasi dan menentukan Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman yang menjadi dasar perumusan straetegi. (3) Penetapan Strategi, yaitu tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi yang dijalankan organisasi.

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan tersebut, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan (*Strategic Formulation*). Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensiinti serta memperoleh keunggulan bersaing.

a) Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan adalah proses dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Secara garis besar analisis lingkungan disini mencakup analisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

Lingkungan eksternal mencakup lingkungan umum dan lingkungan industri, sedangkan analisis internal mencakup analisis mengenai aktivitas perusahaan atau bisa juga analisis mengenai sumber daya, kapabilitas serta kompetensi inti yang dimiliki. Hasil dari analisis lingkungan ini setidaknya memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya disederhanakan dengan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dimilikinya. Analisis eksternal juga memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman (OT) sedangkan analisis lingkungan internal memberikan tentang keunggulan dan kelemahan (SW) dari perusahaan.

b) Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal diharapkan kita sudah dapat memiliki gambaran mengenai posisi perusahaan dalam persaingan, dimana diharapkan kita sudah mampu untuk mendefinisikan keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan (SWOT analisis). Berdasarkan informasi ini selanjutnya ditentukan dan ditetapkan ke arah mana perusahaan hendak di arahkan. Bedasarkan dua indikator utama yang digunakan untuk menentukan arah organisasi. Pertama adalah misinya, misi ini berfungsi sebagai reison d'etre, menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada.

Selain itu misi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik tentang pelanggan, pasar, filosofi, citra, yang diinginkan dari masyarakat serta

teknologi yang nantinya digunakan oleh perusahaan. Hal yang tak kalah pentingnya dalam menentukan arah perusahaan ini adalah menetapkan tujan yang diinginkan perusahaan, dimana tujuan ini biasanya merefleksikan target yang dicapai oleh organisasi. Sebelum sebuah misi dan tujuan ditentukan, perusahaan sebaiknya memiliki visi atau kita sebut sebagai strategic *architecture*. *Strategic Architecture*, misi dan tujuan ini agar mantap dan optimal harus didorong oleh suatu *Strategic Intent*.

c) Penetapan Visi dan Misi Objektif

Menetapkan visi dimaksudkan untuk memberikan arah tentang apa atau seperti apa organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang, atau secara ringkassuatu pandangan ke depan tentang perusahaan atau organisasi. Crown Dirgantoro, mendefenisikan visi sebagai pandangan yang jauh tentang perusahaan atau organisasi, tujuan-tujuan perusahan yang harus dilakukuan untuk mencapai tujuan tersebut.

Misi lebih spesifik lagi dibandingkan dengan visi. Misi secara spesifik menekankan tentang produk yang diproduksi, pasar yang dilayani, dan hal-hal lain secara spesifik berhubungan langsung dengan bisnis. Secara singkat visi memberi pejelasan tentang bisnis perusahaan. Sedangkan objektif lebih kepada penetapan target secara spesifik dan dapat terukur yang ingin dicapai perusahaan untuk jangka waktu tertentu atau target yang ingin dicapai.

d) Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Aktivitas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu: Analisis strategi, perencanaan strategi, pemilihan strategi. Untuk dapat melakukan formulasi strategi dengan baik, maka ada ketergantungan yang erat dengan analisis lingkungan dimana formulasi strategi membutuhkan data dan informasi dari analisis lingkungan. Setelah melakukan analisis lingkungan dan menentukan ke mana organisasi dapat diarahkan berdasarkan arsitektur strategis (*strategic architecture*), misi dan tujuan yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa organisasi dapat mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan tadi. Untuk itulah maka perlu diformulasikan berbagai strategi atau rencana untuk mencapai arah yang diinginkan tersebut. Formulasi strategi dalam hal ini adalah proses merancang dan menyeleksi berbagai strategi yang pada akhirnya menuntun pada pencapaian misi dan tujuan organisasi. Fokus utama dari strategi organisasi adalah bagaimana menyesuaikan diri agar dapat lebih baik dan cepat bereaksi dibanding pesaing dalam persaingan yang ada.

Perencanaan Tindakan Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti dari yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arahan (misi-visi-goal) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (*The Step-By Step Sequence of Actions*). Sedangkan dalam rumusan anggaran berisi rencana kegiatan/ program (biasanya tahunan) yang disertai taksiran sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang direncanakan. Selain itu juga ditunjuk orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan.

1) Program

Program adalah pernyataan antivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru.

2) Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program dapat dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan

rinci dari strategi baru dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan.

3) Prosedur

Prosedur yang kadang disebut *Standard Operating System* (SOP). Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktifitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan program-program perusahaan.

Setelah sebuah strategi diformulasikan, strategi tersebut harus dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang disebut dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana langkah untuk mengatasinya. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan dibahas secara lebih mendalam. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi Strategi diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan.

h) Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktifitasaktifitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

Pengendalian strategik merupakan pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplemen-tasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tahap pengendalian strategi ini merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian proses manajemen strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam tahap ini coba dievaluasi apakah implementasi strategi benar-benar sesuai dengan formulasi strategi atau tidak. Atau apakah asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam analisis lingkungan masih valid atau tidak dan sebaliknya. Hasil dari tahap pengendalian strategi ini sangat bermanfaat dan dapat menjadi input untuk proses manajemen strategi perusahaan selanjutnya. Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat memiliki daya saing yang berkelanjutan dalam persaingan. Karena strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat.

C. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor. 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a) Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b) Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal

sebagai berikut; (1) Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik. (2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. (3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c) Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d) Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
e) Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
f) Tanggung jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g) Kelengkapan sarana dan prasaranaTersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana tekn ologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Kemudahan akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
h) Kedisplinan, kesopanan dan keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
i) Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Standar Pelayanan Publik Pedoman penyusunan standar pelayanan publik didasarkan pada Peraturan Menpan Nomor 20 tahun 2006. Komponen standar pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2006 sekurang-kurangnya meliputi ; (a) Jenis pelayanan, yaitu: pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan. (b) Dasar hukum pelayanan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraanpelayanan. (c) Persyaratan pelayanan, yaitu: syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative. (d) Prosedur pelayanan, yaitu; tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. (e) Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu; jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya pelayanan, yaitu: besaran biaya/ tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan. Produk pelayanan yaitu; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Sarana dan prasarana, yaitu; fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandangcacat. Mekanisme penanganan pengaduan, yaitu; tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan secara formal disusun oleh organisasi penyelenggara layanan. Namun demikian, pada prinsipnya penyusunan standar kualitas layanan publik harus mempertemukan kepentingan, referensi, dan preferensi kedua belah pihak yakni provider dan user.

D. Konsep Parkir

1. Pengertian Parkir

Pengertian "parkir" se cara umum adalah suatu keadaan tidak bergeraknya kendaraan secara permanen (Tobing). Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lain nyayang sering dijumpaidalamper aturanlalu-lintas, yakni "stop" yang di artikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996, 1).

Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir (Warpani). Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu kendaraan untuk satu ruang parkir (Edward). Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

Tujuan penyelenggaraan perparkiran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di daerah, yang menyatakan ; Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkendali di daerahnya, hal itu bertujuan untuk menjamin agar dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah serta dapat mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

2. Satuan Ruang Parkir

Suatu" Satuan Ruang Parkir (SRP)" adalah tempat parkir untuk satu kendaraan. Pada tempat di mana parkir dikendalikan, maka tempat parkir harus diberi marka pada permukaan jalan.

Tempat tambahan diperlukan bagi kendaraan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut tergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir dipilih atas dasar pertimbangan sebagai berikut (Pusdiklat Dirjen Perhubungan Darat, 95;113); (a) Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah kecepatan kendaraan yang tinggi. Parkir bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi. (b) Kondisi jalan dan lingkungan makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masingmasing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

3. Pengendalian Parkir

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber dayaparkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agarmempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk daninformasi.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yangditerapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil.

Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah (DirektoratJenderal Perhubungan Darat, 1998;146) adalah; (1) Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan. (2) Mengurangi kecelakaan. (3) Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif. (4) Memelihara benda sejarah, sekiranya berada di suatu kota dengan nilaisejarah yang tinggi. (5) Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat. Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seorang perencana sistemtransportasi yang komperhensif dan terintegrasi.

Tujuan Pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadilebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*Onstreet Parking*) menjadi parkir di luar jalan (*Off Street Parking*). Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk memepengaruhi kemacetan kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik.

4. Kebijakan Parkir

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain: (1) Kebijakan tarip parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum. (2) Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan aruslalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan. (3) Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengangembok roda.

5. Parkir Liar

Parkir liar adalah kendaran yang parkir di sembarang tempat yang bukan tempat parkir resmi atau berambu dilarang parkir/stop. Meningkatnya volume kendaraan baik warga itu sendiri maupun wisatawan membuat semakin maraknya parkir liar diberbagai tempat. Karena permasalahan ini bukan hanya pada infrastruktur, akan tetapi pada masalah disiplin masyarakat juga harus dirubah. Menindak lanjuti permasalahan parkir liar, Dinas Perhubungan (DISHUB) akan melakukan hukuman penggembosan dan pencabutan pentil ban bahkan pengembokan bagi kendaraan yang kedapatan parkir di sembarang tempat. Sementara itu, kehadiran juru parkir liar juga diusahakan untuk ditertibkan dengan melakukan pembinaan agar tidak melakukan pemungutan liar. Kemudian untuk menertibkan parkir didasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 14 tahn 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: huruf (d) berhenti dan Parkir; dan pasal 287 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf (d) atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf (e) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

E. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka telah ditetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan yang meliputi bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, prasarana, pengembangan dan keselamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke mempunyai fungsi antara lain: (1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;(2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; (3) pembinaan pelaksanaan dan pelaksaan tugas sesuai dengan lingkup Perhubungan; (4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan terdiri dari ;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perhubungan Darat;
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
5. Bidang Prasarana;
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke pada tanggal 09 Oktober 2020)

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka dapat dipastikan kemandirian daerah tersebut dapat tercapai sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Abdul Halim (2004:94) menjelaskan bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sector pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatru daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Abdul Halim (2007:96) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;(4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terdahap pembahasan maka peneliti berusaha melakukan berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil ekspklorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Restribusi Parkir di Kota Palu. Oleh Dicky Yusuf dan Rajindra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Palu Selatan sebagai pusat keramaian yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan November 2018. Narasumber untuk penelitian ini sebanyak 6 orang. Narasumber dipilih secara *purposive* berdasarkan aspek kehidupan sosial, lingkungan, ekonomi serta pengalaman mengenai pengelolaan retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menemukan kondisi penataan parkir di Kota Palu belum tertata rapi serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir, minimnya kebutuhan ruang parkir sehingga dapat berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu dan masih adanya tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum optimalnya penerapan Perda sehingga diperlukannya pengkajian ulang terhadap keberadaan Perda melalui kegiatan survei yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkiri ilegal di Kota Pekanbaru. Oleh Feriyanti barasa. Permasalahan penelitian ini antara lain adanya parkir liar di pinggir jalan umum Pekanbaru yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terbatasnya parkir pinggir jalan umum akibat ketentuan parkir, petugas parkir yang menggunakan lokasi parkir liar, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengaturan parkir liar di pinggir jalan umum Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pengaturan parkir liar dengan menggunakan analisis SW0T.

3. Strategi pengelolaan perparkiran di kota salatiga Oleh Nita Haryanti, Hardi Warsono, Hesti Lestari.

Tujuan penelitian Strategi pengelolaan parkir di Kota Salatiga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi salatiga. Proses analisis yan dilakukan diawali dengan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk menilai kelemahan, kekuatan peluang dan ancaman dalam peningkatkan parkir kota Salatiga. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga dihasilkan strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi menggunakan matriks SWOT WT Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis SWOT dengan menggunakan uji laksmus untuk menentukan alternatif – alternatif strategis, memutuska strategi untuk memperkirakan kenaikan retribusi parkir.

4. Evaluasi Kebijakan penanggulangan parkir liar di Kota Yogyakarta (*Studi penelitian Deskripsi Kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta*) Oleh Carollina Bella Viesta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghetahui upaya Dinas Perhubungan dalam penangganan masalah parkir liar di Kota Yogyakarta dan untuk menghetahui proses Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dalam menertibkan parkir liar di kota Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan parkir ilegal, kebijakan yang digunakan Dinas Perhubungan kota Yogyakarta dalam menanggulangi parkir liar, penanggulangan dan tindakan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menertibkan parkir liar serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam bidang perparkiran.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di kota Yogyakarta berupa tindakan yang bersifat terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan dan tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Yogyakarta adalah pembinaan dan penertiban, peringatan, operasi gabungan penegakan Perda, pencabutan surat ijin, penindakan tegas berupa sidang tindak pidana ringan. Penanggulangan diatas diharapkan dapat mengurangi aktivitas parkir liar dan mengwujudkan realisasi kebijakan dibidang perparkiran.

H. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir yang menjadi besar dalam penelitian ini adalah mempertahankan eksitensi analisis swot sebagai Strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.



Gambar 2.2 Kerangka berpikir

Dari kerangka berpikir tersebut penjelasannya adalah, peneliti melakukan langkah pengimputan mengenai strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke melalui data – data dari berbagai sumber. Data-data tersebut menjadi bahan peneliti dalam menyusun dan memilah adanya kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pada strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Parkir Liar diPasar Wamanggu. Kemudian setelah mendapatkan yang termasuk dalam ke-empat faktor analisis SWOT tersebut yang di dapat dari proses wawancara, kemudian di analisis. Hasil dari analisis tersebut berupa penjabaran dan pengolahan untuk menjawab strategi S-O,W-O, S-T, W-T. Strategi tersebut dapat digunakan dalam gambaran untuk menanggulangi Parkir Liar di Pasar Wamanggu dapat diteratasi dengan baik. Sehingga pengguna jalan di sekitar area pasar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berlalu lintas.

3. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan metode menjamin dan menghasilkan kebenaran yang obyektif. Metode adalah cara, sedangkan kebenaran merupakan fakta yang diungkap dalam tujuan. Cara penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran atau fakta yang diungkapkan merupakan bentuk kebenaran yang kuat. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian metode merupakan hal yang sangat di perlukan. Dalam membahas tentang "Analisis SWOT sebagai Strategi dalam Menanggulangi Parkir Liar Studi pada Dinas Perhubungan di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke", penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskripsi bertujuan untuk menggambarkan obyektif data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2008).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Dinas Perhubungan Merauke Kabupaten Merauke, demi memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan September 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yaitu berupa fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang diuji kebenarannya relevan dan lengkap. Jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data yang penulis dapatkan ini bersumber dari:

1. Data Primer
   Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Analisis SWOT sebagai Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.
2. Data Sekunder
   Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai *literature* baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dokumen dari Dinas terkait.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan penunjang. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, sedangkan informan penunjang dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran, Petugas Parkir dan Pengguna Parkir di Pasar Wamanggu Kota Merauke. Tabel 3.1. Informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Dinas Perhubungan	1
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Merauke	2
3	Petugas Parkir di Pasar Wamanggu Kota Merauke	3
4	Pengguna Parkir di Pasar Wamanggu Kota Merauke	2
Jumlah		8 Orang

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki atau di jumpai secara sistematis.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data. Wawancara yang dilaksanakan secara berencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, penelitian telah menyiapkan pertanyaan tertulis yang telah di siapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dengan teknik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor – faktor tersebut (Arikunto. 2010), kemudian mengolah data tersebut dilakukan dengan *Data Reduction* (Data Reduksi), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusions Darwing / Verification* (Penarikan Kesimpulan / Verifikasi.

1. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Reduksi yaitu merangkum, memilih hal – hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dengan begitu data direduksi ini memberikan gambaran yang jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data maka memudahkan dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. *Conclusions Darwing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

G. Rencana Penelitian

Tabel 3. 1 Rencana Penelitian

NO	KETERANGAN	2019	2020		
		Nov	Okt	Sptr	Nov
1	PROPOSAL				
2	PENELITIAN				
3	SKRIPSI				
4	YUDISIUM				
4	WISUDA				

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Wamanggu

Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten/ kota terbesar di Papua memberikan dampak yang baik untuk perkembangan ekonomi di kawasan ini. Perkembangan dalam beberapa potensi seperti perdagangan, pariwisata, industri, usaha kecil dan menengah dapat diarahkan. Potensi seperti ini serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka Kabupaten Merauke yang sedang dalam perkembangan ini akan mampu menjadi daerah yang baik untuk perkembangan perekonomian. Banyak pembangunan yang dilakukan, salah satunya fasilitas umum yang akan menunjang pergerakan di sekitarnya. Letak geografis Kabupaten Merauke berada antara 1370 - 1410 BT dan 5000'9 00' LS. Memiliki 20 kecamatan, diantaranya yang terbesar ialah Kecamatan Merauke, Tanah Miring, Semangga, Kurik, dan Malind. Daerah Kabupaten Merauke saat ini memiliki luas 46.791,63 km2, dengan jumlah penduduk sebesar 278.200 jiwa (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Merauke dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Merauke).

Pasar Wamanggu memberikan dampak yang baik untuk perkembangan perekonomian penduduk di kawasan sekitar. Maka hal ini akan meningkatkan mobilitas arus angkutan, baik itu angkutan umum atau pun kendaraan pribadi. Kawasan pasar Wamanggu adalah salah satu sentral perdagangan dan perbelanjaan yang sangat ramai, sehingga memerlukan fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang kegiatan yang ada di sana. Salah satu fasilitas yang paling dibutuhkan adalah tempat parkir yang mampu menampung kendaraan yang ada, sehingga tidak mengganggu arus lalulintas di sekitarnya. Pasar Wamanggu memiliki luas keseluruhan 15.820 m^2 dengan luas bangunan 15.030 m^2, bangunan yang berlantai 3 (tiga) yang terdiri atas 4 (empat) blok yang diperuntukan berbagai jenis dagangan. Jumlah kios sebanyak 1140 kios. Dimana aktifitas pasar dimulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIT. (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Merauke) 2 Lahan parkir yang tersedia di kawasan pasar Wamanggu dibedakan menjadi dua, yaitu parkir roda dua dan parkir roda empat. Parkir kendaraan motor pertama yang berada di halaman pasar bagian samping berukuran 26x2 meter, parkir kendaraan motor kedua terletak di halaman pasar bagian depan dengan ukuran 58x2,7 meter. Untuk parkir kendaraan mobil yang berada di halaman depan pasar berukuran 60x2,5 meter, sedangkan untuk parkir mobil bagian luar berukuran 98x2,5 meter, dengan pola parkir yang belum jelas dan tidak ada marka untuk petak parkir, sehingga para pengendara memarkir kendaraan mereka tidak teratur. Pelayanan parkir di kawasan pasar Wamanggu selama ini kurang memadai dan tidak terarah. Pada lahan parkir yang tersedia tidak terdapat petak atau pembatas yang menegaskan tempat tersebut merupakan area parkir. Kurang nya\ lahan parkir juga menjadi salah satu masalah yang ada saat ini. Kapasitas parker kendaraan roda dua yang kurang dari jumlah kendaraan yang ada menyebabkan kendaraan roda dua yang lebih diarahkan ke area parkir roda empat. Sehingga kapasitas parkir untuk roda empat pun berkurang. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan roda empat pada ruas jalan Paulus Nafi yang berdampak pada terhambatnya arus lalu lintas sekitar. Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan studi evaluasi pelayanan parkir di kawasan pasar Wamanggu, dengan adanya studi ini diharapkan bisa menjadi alternatif pemecah guna mengurangi masalah transportasi, sehingga kinerja area parkir dan kinerja ruas jalan menjadi lebih baik khususnya di kawasan pasar Wamanggu.

2. Profil Dinas Perhubungan Kota Merauke

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua maka salah satunya pada Propinsi di Ujung Timur Indonesia di wilayah Papua Selatan tepatnya di Kabupaten Merauke. Otonomi Khusus ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan di masing-masing daerah salah satunya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

a. Visi

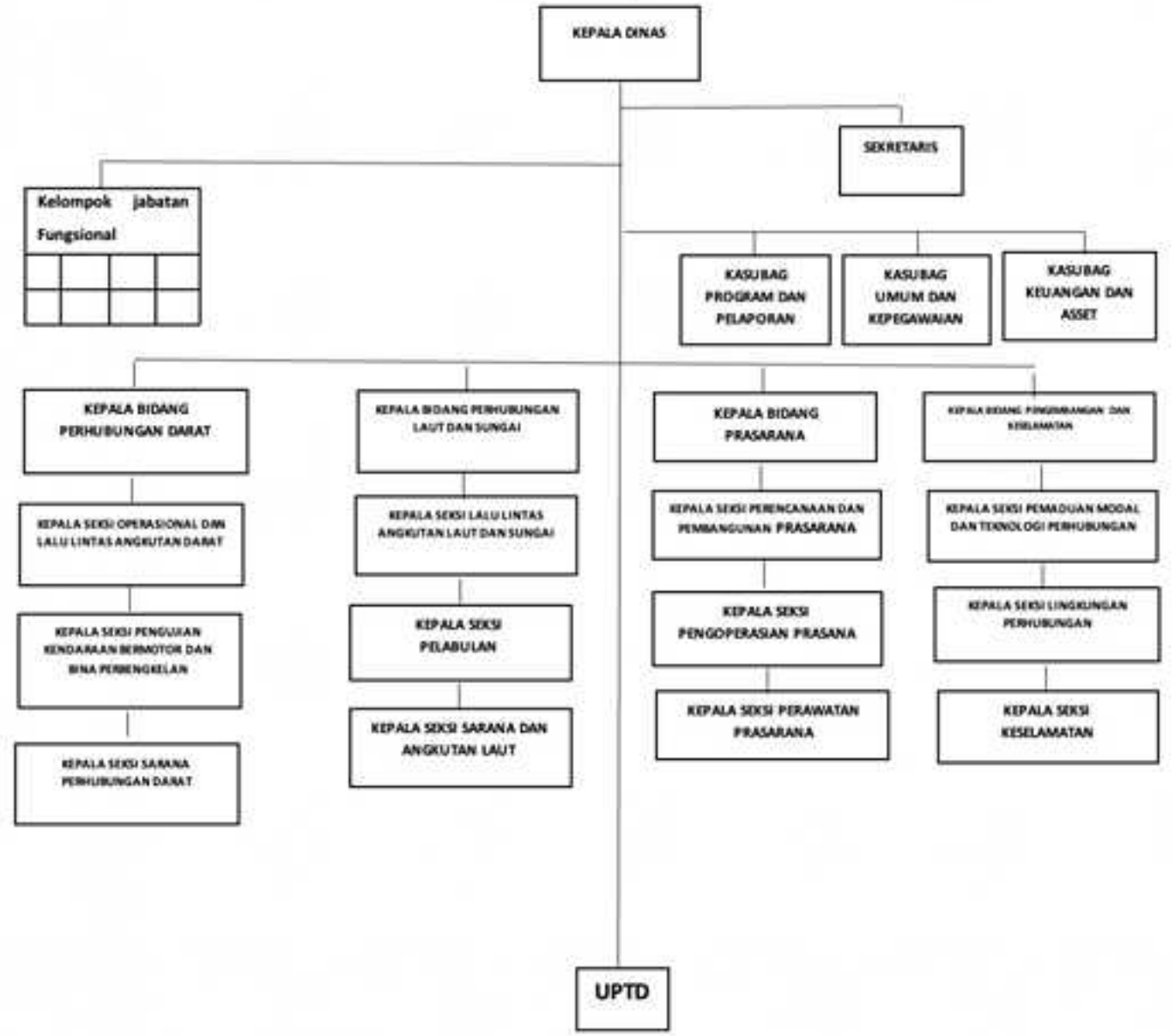
Terwujudkan Kabupaten Merauke Sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan yang Strategis

Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal Melalui Pertanian Sebagai Sektor Utama.

b. Misi

1. Peningkatan stabilitas wilayah dan peran sebagai daerah perbatasan Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan wilayah pengembangan pada tingkat kampung, distrik dan kabupaten.
2. Pembentukan kota madya dan provinsi papua selatan;
3. Pembangunan pertanian yang berorientasi pada perwujudan lumbung pangan untuk ketahanan pangan di tingkat nasional maupun internasional.
4. Penguatan ekonomi daerah dan peluang investasi
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengembangan potensi daerah
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat kampung
7. Penguatan identitas budaya dan kearifan lokal.

Struktur Organisasi



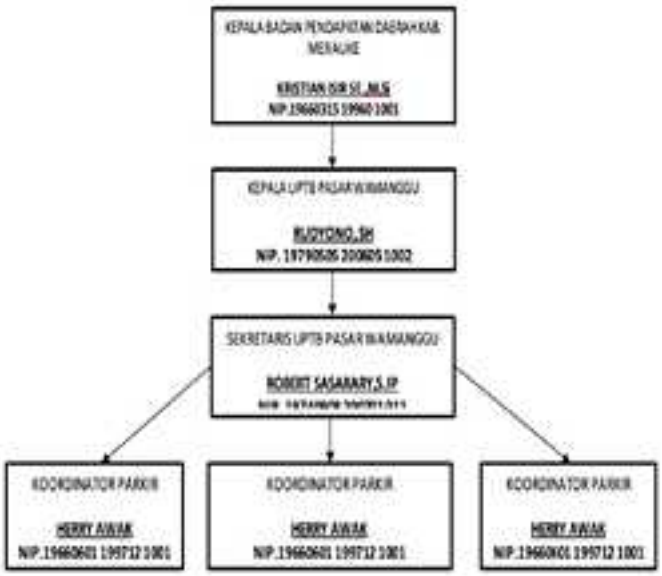
Sumber data dari: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka sudah ditetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas menyelenggarakan tugas yaitu (1) merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan;(2) melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, perhubungan darat, perhubungan laut dan sungai, prasarana, pengembangan dan keselamatan.
2. Sektretariat Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dana tau perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset.
3. Bidang Laut Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dana tau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengkajian dan atau bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang perhubungan darat yang meliputi operasional dan lalu lintas angkutan darat, penguji kendaraan bermotor dan bina perbengkelan dan saran perhubungan darat.
4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang perhubungan laut dan sungai yang meliputi lalu lintas angkutan sungai dan laut, kepelabuhan serta sarana dan angkutan laut.
5. Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang prasarana yang meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana.
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis bidang pengembangan dan keselamatan yang memadai.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar
Struktur Organisasi UPTB Pengelola Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke



Sumber data Unit Pelaksana Teknis Badan Pegelola Pasar Wamanggu

B. Tipologi Informan

1. Pelaksanaan Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu, Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat, serta bagian juru parkir liar yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan tipe wawancara terstruktur. Dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan disusun disesuaikan dengan variabel dalam penelitian ini. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dari para informan penelitian.

2. Identitas Informan

Identitas informan penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke adalah Dinas Perhubungan sendiri dan Koordinator Parkir Pasar Wamanggu dalam menertibkan parkir liar di Kabupaten Merauke dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu pengurus parkir di kantor Dinas Perhubungan dan Koordinator Parkir Pasar Wamanggu di Kabupaten Merauke.

Adapun data yang disajikan terdiri dari empat bagian, yaitu karakteristik informan penelitian yang mencakup mengenai usia, dan jabatan. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang terkait strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan yang berasal dari pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun dalam pelaksanaan wawancara penulis lakukan, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengalami pengembangan yang disesuaikan denga permasalahan penelitian.

Berdasarkan pengambilan data di lapangan diperoleh identitas informan dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan/Jabatan
1	Jonias Ndiken, ST	57	Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat
2	Herry Awak	54	UPTD Pasar Wamanggu Koordinator Parkir
3	Jonias Ndiken, ST		Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat
4	Martinus Kagayemu	27	Juru Parkir Liar
5	Yosep Wambeke	38	Juru Parkir Liar
6	Anjela Gebze	28	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga
7	Rudy	43	Masyarakat, Pedagang
8	Natalia L. Ndiken	38	Masyarakat, Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan tabel di atas dari keseluruhan informan yang berjumlah 5 orang, frekuensi iforman ada pada informan dengan usia antara 25-47 tahun karena usia tersebut dianggap sebagai usia paling produktif untuk memberikan jawaban terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubunga dalam menertibkan parkir liat di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.

C. Hasil Penelitian

Metode wawancara yang dipilih oleh penulis adalah metode wawancara berstruktur, dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahuluh penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Namun di dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

1. Situasi Pengendalian Pengelola Parkir di Pasar Wamanggu Kota Merauke

Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kabupaten Merauke harus tepat sasaran atau tujuan. Sebagai salah satu agen pelayan publik dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan jasa perhubungan, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh sebab itu Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke sebagai pelaksana harus memberikan informasi serta fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pergerakan masyarakat. Maka sehubungan dengan hal tersebut untuk mengetahui realita yang terjadi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, peneliti mengajukan pertanyaan, "Secara umum bagaimana situasi berparkiran di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke?" Bapak Jonias Ndiken, ST selaku Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat Kabupaten Merauke menjelaskan,

"Yah, secara umum situasi perparkiran di Pasar Wamanggu ini sudah aman, teratur dan kondusif. Dan kita disini selaku unit pemerintah yang bertugas sebagai lembaga pemerintah juga bertanggung

jawab dalam pengelolaan parkir. Karena itu bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan parkir menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Dari penertiban hingga memberikan sanksi bagi para pelaku parkir liar yang menolak untuk bekerja sama juga berupa tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi kita disini berusahalah sebaik mungkin untuk menertibkan area parkir dan lalu lintas guna menjaga kelancaran pergerakan masyarakat juga."

Lalu penulis kembali bertanya kepada Bapak Herry Awak, selaku pengelola parkir di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke:

"Situasi parkir di pasar wamanggu ini memang sudah cukup aman, rapi dan kondusif. Pengendalian pengelolaan parkir di area pasar wamanggu yang dilakukan pihak Dishub sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan di beberapa kawasan sudah terdapat pengawas-pengawas yang ditempatkan untuk mengontrol kawasan tersebut. Namun memang masih ada beberapa titik yang penataan parkirnya kurang tertib akibat tidak adanya ketersediaan ruang parkir. Dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas seperti area mana yang bisa dijadikan tempat parkir atau tidak."

Kemudian, penulis juga meminta pendapat dari beberapa masyarakat seperti halnya Bapak Rudy, Ibu Natalia Ndiken, dan Ibu Ajela Gebze. Dan berdasarkan tanggapan dari Bapak Rudy bahwasanya:

"Area parkir di Pasar Wamanggu ini sebenarnya sudah tertata rapi dan teratur. Hanya saja masih ada di beberapa titik titik keramaian seperti halnya di pusat keramain pada saat-saat tertentu yang menimbulkan kemacetan yang diakibatkan masyarakat yang parkir sembarangan. Dan hal ini juga disebabkan karena tukang parkirnya itu yang cuma mementingkan uang saja."

Penulis bertanya kembali juga dengan Bapak Herry Awak, mengenai pengendalian pengelolaan parkir di Pasar Wamanggu:

"Pengendalian pengelolaan parkir yang dilakukan pihak Dishub berupa memaksimalkan petugas lapangan untuk memantau dan mengatur perparkiran agar tidak terjadi kemacetan. Memberikan pengarahan terhadap para petugas pengelolaan parkir, baik dari staf administrasi pengawas dan petugas patrol agar dapat membangun sinergisitas dan etos kerja di lingkungan Dishub."

Pengendalian atau kontrol adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian (*evaluation*) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam melakukan pengendalian parkir, Dinas perhubungan melakukan dua upaya pendekatan, adalah pengendalian parkir secara preventif dan pengendalian yang bersifat represif dalam pengendalian retribusi parkir adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam perolehan dan pengumpulan dana retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Merauke.

2. Parkir Liar

Dengan adanya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*). Akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut, yang pada akhirnya terjadi penyempitan lebar jalan dan besar kemungkinan akan menurunkan kapasitas ruas, besarnya penyempitan tersebut dipengaruhi oleh volume parkir, ukuran kendaraan dan sudut parkir.

Dalam kenyataanya terbatasnya lahan parkir yang tidak didukung dengan fasilitas parkir yang memadai sehingga ada oknum-oknum yang menjadi jukir (juru parkir) liar yang mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena jukir (juru parkir) menggunakan sebagian badan jalan untuk lahan parkirnya yang menimbulkan kemacetan, dan tidak sedikit masyarakat yang resah

dengan adanya jukir (juru parkir) liar.

Sehubungan dengan hal ini, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Herry Awak selaku Koordinator pengelola parkir di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar untuk memberi tanggapan bahwa:

"Sebenarnya kami sudah menempatkan petugas petugas lapangan untuk mengelola parkir disini untuk memberantas yang namanya parkir liar itu. Kami bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan sudah memberikan identitas tanda pengenal dan karcis resmi kepada petugas petugas parkir legal di Binjai ini. Dan apabila kami melihat tindakan-tindakan mencurigakan (seperti halnya jukir liar) maka, hal itu akan segera kami tindak."

Lalu, Ibu Ajela Gebze, selaku masyarakat Kota Kabupaten Merauke yang beraktivitas di Pasar Wamanggu memberi tanggapan bahwa:

"Memang tukang parkir liar ini dilema buat pemerintah, menjadi masalah bagi pemda setempat, tapi tidak buat sebagian masyarakat, karena sebagian besar profesi ini untuk menyambung hidup mereka dan keluarganya. Tapi yah, baik itu tukang parkir resmi atau liar tidak membuktikan yang resmi itu lebih berkompeten. Bahkan ada saja tukang parkir resmi yang hilang pas dibutuhkan dan muncul saat minta bayaran. Tapi yah memang juru parkir liar itu salah ini jelas sudah termasuk pungutan liar yang merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri, juga perlu diajarkan kepada masyarakat setiap parkir harus memakai karcis sebagai bukti yang sah atas jasa yang harus dibayarkan tentunya sebaliknya".

3. Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke.

Kemudian sehubungan dengan strategi yang diterapkan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke terkait strategi menertibkan parkir liar, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimana strategi yang diterapkan dalam rangka menertibkan parkir liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke?" Bapak Herry Awak memaparkan tanggapannya sebagai berikut

"Kami selaku Koordinator Unit Pelaksana Teknis di Pasar Wamanggu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Sehubungan dengan strategi menertibkan parkir liar itu, Dinas perhubungan Kabupaten Merauke ini bertanggung jawab memberikan sanksi bagi para pelaku parkir liar yang menolak untuk bekerja sama. Pihak Dinas Perhubungan terus berupaya untuk merangkul / mengajak para juru parkir liar untuk bergabung dengan pihak Dinas Perhubungan. Diharapkan dengan bergabungnya para juru parkir liar dapat memberikan retribusi terhadap PAD parkir di tepi jalan, dan juga para juru parkir liar mendapatkan tindak perlindungan dari Dinas Perhubungan seandainya terjadi pemungutan liar dari pihak-pihak lain, seperti ormas-ormas maupun oknum yang lainnya. Bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap para pelaku parkir liar diwujudkan dalam bentuk pembinaan langsung terhadap para pelaku parkir liar tersebut. Dalam rangka melakukan pembinaan Dinas Perhubungan juga memberikan petunjuk teknis dan operasional dalam menjalankan pengelolaan tempat parkir. Petunjuk teknis yang dimaksud antara lain, pengenaan atribut resmi dan menggunakan identitas resmi. Sedangkan petunjuk operasional adalah petunjuk mengenai tata cara pengelolaan di tempat parkir, misal batas area parkir, dan tata cara penatan lahan parkir."

Bapak Jonias Ndikern, ST selaku Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat juga menambahkan:

"Proses pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada para pelaku parkir liar tentang penertiban parkir liar dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar bertujuan memberikan pengertian bahwa kegiatan parkir liar yang dilakukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran, dan juga agar kedua belah pihak sama-

sama memberikan keuntungan satu dengan yang lain setelah ada kesepakatan untuk pembinaan oleh kedua belah pihak."

Dari ketiga responden diatas, dapat terlihat bahwa strategi yang dijalankan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke adalah pembinaan Dalam bentuk sosialisasi itu sendiri berupa pendekatan secara persuasif, yaitu dengan mengajak para pelaku parkir liar untuk mau dinaungi / dibina keberadaannya oleh Dinas Perhubungan. Tentu saja dengan sistem pembinaan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) parkir tepi jalan.

Komunikasi secara persuasif terjadi antara pihak Dinas Perhubungan dengan pelaku parkir liar yang didalamnya disertai dengan himbauan, ajakan, maupun tindakan membujuk agar pelaku parkir liar mau mengikuti/bertindak sesuai apa yang dianjurkan oleh pihak Dinas Perhubungan, yaitu kegiatan parkir liar yang dijalankan mau dibina oleh pihak Dinas Perhubungan.

Dapat dikatakan juga, para juru parkir liar yang menyelenggarakan kegiatan parkir di tepi jalan juga mendapatkan keuntungan sendiri, baik dari segi keamanan maupun dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan. Proses sosialisasi tentu saja tidak lepas dari bentuk komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan dan juga pelaku parkir liar, proses komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa kegiatan parkir liar adalah kegiatan yang melanggar hukum.

3. Faktor Penghambat/Kendala dalam Pelaksanaan Strategi Menertibkan Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

Kemudian, penulis kembali lagi bertanya pada Bapak Herry Awak selaku Koordinator pengelola parkir di Pasar Wamanggu bahwa "apa saja hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi menertibkan parkir liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke?"

"Yah yang pasti untuk menertibkan kegiatan parkir liar ini juga menemui berbagai respon dari para juru parkir liar yang telah diberikan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Ada yang menolak juga ada yang menyetujui himbauan yang sudah diberikan. Jadi kendalanya ini ada pada jukir-jukir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak Dishub, karena takut merasa dirugikan dan kapasitas jalan kurang mendukung untuk dilakukan parkir tepi jalan."

Bapak Bapak Jonias Ndiken, ST Kepala Seksi Operasional dan Lalu Lintas Angkutan Darat selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasana Perhubungan Darat juga menanggapi bahwa:

"Memang penyebab kemacetan di tempat keramaian ini parkir liar, dimana adanya kesempatan menguntungkan itu dengan membuat area parkir sendiri di pinggir jalan dan menetapkan sejumlah tarif illegal dan menguntungkan oknum-oknum tertentu. Dan yang jelas jukir-jukir ini yang mengundang kemacetan dan tukang palak (tukang palang dan meminta uang) yang meresahkan masyarakat. Walaupun diterapkan adanya pembinaan bagi juru-juru parkir liar itu, belum tentu semuanya mau ikut bekerjasama mendukung kelancaran lalu lintas. Begitu pun cuaca yang tidak mendukung dalam penertiban dan bebrapa pengguna parkir yang tidak mau mengikuti peraturan."

Sehubungan kendala/hambatan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar ini, Bapak Jonias Ndiken, ST menegaskan bahwa:

"Masih terbatasnya ruang parkir, dan kurangnya kesediaan para juru parkir liar dalam bekerjasama dalam pembinaan menertibkan parkir dan kurangnya kesadaran kita untuk mensejahterakan masyarakat dengan kelancaran pergerakan masyarakat itu sendiri."

Penulis juga bertanya dengan juru parkir liar di sekitaran pajak Kebun Lada, yaitu Bapak Yosep Wambele "Kenapa Bapak selaku juru parkir tidak mau ikut bekerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan menyediakan lahan parkir legal?" dengan hasil wawancara:

"Yah saya cari duit untuk keluarga, mana mau saya bagi untung sama orang lain. Kalau saya jadi tukang

parkir mandiri, untungnya lebih besar dari pada aku setor setor lagi sama orang dinas. Dan kalau di bilang lebih beresiko, semua pekerjaan juga ada resikonya. Saya yang kerja, saya yang capek, kenapa mesti setor ke orang lain. Kan ini juga jalan umum, bisa di pakai untuk semua warga."

Hasil serupa juga ditegaskan oleh Bapak Martinus Kagayemu, selaku juru parkir liar di depan pasar wamanggu:

"Jadi tukang parkir liar itu seperti jadi bos dan karyawannya sekaligus. Tidak perlu setor kemana-mana, toh saya bisa kerja suka-suka saya dari jam berapa sampai jam berapa. Lagian saya jadi tukang parkir disini dari sore kok, pas lagi rame-ramenya aja. Jadi lebih nguntungin kalau jadi tukang parkir liar, gak perlu setor sana sini. Untungnya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bagi rata sama karyawannya"

Dari hasil wawancara yang di dapat dari informan tambahan pelaku parkir liar bahwa dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih belum berhasil secara merata, pada kasus ini peneliti menemukan ketidakmampuan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mempengaruhi bahkan merubah sikap pelaku parkir liar untuk mau ikut bergabung dalam sistem binaan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan.

Data yang mendukung adanya ketidak berhasilan komunikasi persuasif dalam sosialisasi penertiban parkir liar tampak dari respon informan yang peneliti wawancarai. Beliau menolak cara penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan alasan jika ikut dalam sitem binaan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan beliau akan mendapatkan hasil yang berkurang dari total pendapatan yang biasa beliau dapat, selain itu kebimbangan akan pengelolaan pendapatan dari sistem bagi hasil yang diterapkan.

Berdasarkan teori komunikasi persuasif yang diaplikasi ke dalam penelitian ini, komunikasi persuasif telah diterapkan oleh pihak Dinas Perhungan kepada para juru parkir liar. Dengan tindakan persuasif ini diharapkan para juru parkir liar dapat bergabung dalam pembinaan yang telah ditetapkan aturanya oleh Dinas Perhubungan. Komunikasi persuasif yang diterapkan dapat dikatakan sudah dapat mempengaruhi sebagian besar para juru parkir liar untuk mau dinaungi dalam binaan Dinas Perhubungan, dan mereka mau mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.Sehingga kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dengan metode penertiban yang diterapkan tersebut.

Namun memang pada kenyataanya bentuk komunikasi persuasif ini belum mencapai tahap yang maksimal, adanya bentuk penolakan dan keragu-raguan dari pelaku parkir liar terhadap sistem pembinaan yang diterapkan membuat tindakan persuasif yang dilakukan dapat dikatakan msih belum cukup berhasil.

Untuk mengukur dimensi strategi kualitas pelayanan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke serta melihat sejauh mana strategi yang diterapkan efektif apa tidak didalam masyarakat, maka ada 5 hal yang dapat dijadikan alat untuk mengukur yaitu, bukti langsung *(tangibles)*, kehandalan *(reliability)*, daya tanggap *(responsiveness)*, jaminan *(assurance)*, empati *(emphaty)*.

1. Bukti Langsung *(Tangibles)*

Untuk tercapainya kepuasan masyarakat dalam rangka penertiban parkir liar di pasar wamanggu, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas secara fisik, perlengkapan, Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang penting. Sehubungan dengan ini, penulis telah melakukan observasi lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan di lapangan. Fasilitas pelayanan publik yang disediakan oleh pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dan UPTD Pasar Wamanggu untuk memberi kenyamanan pada masyarakat, memiliki beberapa fasilitas yang dapat diandalkan oleh masyarakat, seperti halnya sudah hampir dibanyak lahan parkir disediakan juru parkir legal dengan identitas dan karcis yang resmi untuk membantu masyarakat dalam mencarikan tempat kita untuk memarkirkan kendaraan. Dan disamping itu, salah satu fasilitas yang

tidak kalah pentingnya adalah lahan parkir. Kendaraan masyarakat yang diparkirkan ditepi jalan yang langsung berhubungan dengan badan jalan lalu lintas. Parkir kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp 2.000- sedangkan untuk kendaraan roda empat Rp 3.000-.

2. Kehandalan (*Reability)*

Hal ini berkaitan dengan kemampuan pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dan UPTD Pasar Wamanggu untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertamakali. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat yang menuntut aparatur untuk cekatan dalam bekerja. Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian pelayanan. Kendalan disini merupakan sejauh mana para aparatur dapat secara cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri masyarakat. Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat waktu, akurat, dan terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa masyarakat Kabupaten Merauke merasa cukup puas dengan pelayanan yang di berikan Dinas Perhubungan dalam aspek *reliability* (kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan seperti yang disampaikan bapak Jonias Ndiken, ST bahwa:

"Dinas Perhubungan selaku unit pemerintah yang bertugas sebagai lembaga pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir. Karena itu bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan parkir menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Dari penertiban hingga memberikan sanksi bagi para pelaku parkir liar yang menolak untuk bekerja sama juga berupa tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Jadi kita disini berusahalah sebaik mungkin untuk menertibkan area parkir dan lalu lintas guna menjaga kelancaran pergerakan masyarakat juga."

3. Daya Tanggap *(Responsiveness)*

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuahan dan aspirasi dari masyarakat. Daya tanggap disini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait daya tanggap petugas pelayanan di Kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten Merauke peneliti mewawancarai Bapak Rudy mengatakan:

"Sudah cukup baik, setidaknya keadaan lalu lintas berjalan baik dari sebelum-sebelumnya".

4. Jaminan *(Assurance)*

Hal ini berhubungan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dan keyakinan masyarakat (*confidence*). Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke sebagai kantor yang berwenang menangani masalah pelayanan transportasi perkotaan yang aman, tertib, selamat dan lancar khususnya masyarakat kota Merauke. Banyaknya masyarakat yang seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik dilingkungan kantor maupun di luar kantor. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perbaikan pelayanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan. Menanggapi masalah keamanan dilingkungan sekitar areal parkiran di dalam pasar wamanggu dan diluar pasar wamanggu di Kabupaten Merauke yang terdapat

beberapa juru parkir liar, peneliti mewawancarai Ibu Anjela Gebze sebagai berikut:

"Untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah disediakan lahan parkir beserta penjaga parkirnya. Dengan demikian masyarakat tidak perlu kuartir saat melakukan aktivitas di area pasar dan sekitarnya".

Hal senada juga disampaikan Ibu Natalia Ndiken bahwa:

"Untuk keamanan saya dapat mengatakan aman karena belum ada kejadian yang tidak baik ataupun kriminal di sini seperti pencurian, ini berarti kan kondisi aman, selain itu kita disini juga ada pengamanan dari Pihak Kepolisian."

Dari wawancara di atas dan dari hasil observasi untuk masalah jaminan khususnya keamanan di titik areal Pasar Wamanggu kota Merauke sudah cukup baik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut mengamankan keadaan di parkiran dengan identitas resmi. Petugas pelayanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas dengan baik proses pelayanan berlangsung. Apabila ada keluhan dari masyarakat pihak Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis di pasar wamanggu kota merauke akan segera ditindak lanjuti. Hal tersebut sesuai dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M. PAN/7/2003 dan UU No. 25 tentang Standar Pelayanan yang salah satunya Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pelayanan di Bagian Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Merake dilakukan dengan mengusahakan agar program dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu baik masyarakat yang menerima layanan maupun petugas yang memberikan pelayanan harus memahami prosedur yang berlaku. Masyarakat harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke.

5. Empati *(Emphaty)*

Empati ialah rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Jonias Ndiken, ST selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubunga Darat di Kabupaten Merauke "Apa yang dilakukan pihak Dishub dalam rangka memberikan respon empati kepada masyarakat?"

Jawaban dari Bapak Bapak Jonias Ndiken, ST sebagai berikut:

"Yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah semua petugas kami disini siap siaga melayani masyarakat. Apapun bisa masyarakat laporkan dan akan kami respon dengan sebaik mungkin. Kami melakukan yang terbaik agar distribusi pelayanan kami merata ke seluruh masyarakat tidak memandang suku, ras, agama, golongan, dsb."

Berdasarkan kesimpulan wawancara dari ke-8 informan, bahwa strategi yang diterapkan oleh pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar (Koordinator Parkir) maka strategi pengendalian parkir liar dikatakan sudah cukup baik, meskipun masih ada sejumlah masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat contohnya lahan parkir, kemacatan, kutipan parkir liar yang masih ada di area pasar mawanggu.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui masalah kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah baik dengan banyaknya tanggapan masyarakat yang menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan kesediaan aparat dalam memberikan informasi merupakan hal yang perlu mendapatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. Pembahasan

Informasi yang telah dikumpulkan dari seluruh data,

baik melalui pustaka, wawancara dengan informan yang diharapkan mewakili seperti dari kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar (Koordinator Parkir), Kepala seksi sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, serta sebagian juru parkir liar yang terlibat dengan permasalahan dalam judul penelitian ini. Dari data ini akan diberikan analisis tentang strategi Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pegelola Pasar (Koordinator Parkir) di Kabupaten Merauke. Dalam melakukan analisis, data yang sudah disajikan pada bab selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilaksanakan oleh penulis dapat di sajikan dengan baik.

1. Strategi Menertibkan Parkir Liar

Penerapan Strategi dalam kualitas pelayanan yang diterapkan pada Dinas Peruhubungan Kabupaten Merauke harus tepat sasarn atau tujuan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan dalam mengkomodir kebutuhan masyarakat dengan menyediakan sarana prasaran dan jasa perhubungan dan berkerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Bagian Koordinator parkir dilingkungan Pasar guna menerapkan berbagai strategi dengan menerapkan beberapa program sekaligus yang diharapkan mampy memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke khususnya pengelolaan sarana prasana perhubungan darat bagian parkir di pasar wamanggu untuk menjalankan strateginya harus memberikan daya dukungan seperti informasi, fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan strategi tersebut. Strategi yang dijalankan oleh kedua pihak yaitu Dishub dan UPTD di pasar wamanggu bisa berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat atau mengurangi indeks kepuasan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah bagian parkir di pasar wamanggu secara umum strategi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sejauh ini dinilai sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah parkir di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke dan sikap masyarakat yang menunjukkan apresiasinya terhadap pelaksanaan program ini. Selain itu juga penerapan inovasi yang diluncurkan oleh pusat maupun gagasan-gagasan daerah itu sendiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam mewujudkan tertib parkir liar menjadikan masyarakat semakin optimis terhadap perubahan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Dari gambaran pelaksanaan strategi menertibkan parkir liar dapat terlihat dari penilaian masyarakat terhadap bukti langsung (*tangibles*), kehandalan (*reability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (assurance), empati (*emphaty*): menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta mengalisis data sekunder pada lokasi dan obyek penelitian.

2. Penerapan Informan Terhadap Strategi Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

Pemahaman strategi yang digunakan dalam suatu lembaga/ organisasi pemerintahan sebagai administor pelayanan publik harus memberikan informasi yang jelas kepada sasaran utama adalah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, pada indikator pemahaman strategi dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat masyarakat terhadap program yang masih kurang baik. Strategi yang dijalankan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar dan Dinas Perhubungan sesuai dengan data yang diperoleh dari informan Kepala Seksi Sarana dan Prasana Perhubungan Darat Bapak Jonias Ndiken, ST dan Bapak Herry Awak selaku pengelola parkir di pasar wamanggu dalam pengurusan pengelolaan parkir di pasar wamanggu termasuk didalamnya penertiban parkir liat dengan bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan terhadap para pelaku parkir liar

tersebut. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada para pelaku parkir liar tentang penertiban parkir liar di laksanakan oleh pihak Dinas Perhubungan.

Sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar ini bertujuan agar memberikan pengertian bahwa kegiatan parkir liar yang dilakukan adalah merupakan sebuah bentuk pelanggaran, dan juga untuk memberikan keuntungan satu dengan yang lain sesudah ada kesepakatan dari pembinaan kepada kedua pihak.

Klasifikasi sosialisasi itu sendiri berupa pendekatan secara persuasif, ialah dengan mengajak para pelaku parkir liar untuk mau dinaungi keberadaannya melalui Dinas Perhubungan. Dengan itu tentu saja sistem pembinaan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) parkiran di Pasar Wamanggu.

Selain itu juga para juru parkir liar yang menyelenggarakan kegiatan parkir di pasar wamanggu juga mendapatkan keuntungan sendiri, baik dari segi keamanan maupun dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yaitu sebersar 70:30 persen. Di mana bagian tersebesar diberikan kepada juru parkir liar untuk bergabung dalam sistem pembinaan Dinas Perhubungan.

Dengan adanya penerapan strategi dalam menertibkan parkir liat dapat memberikan keterbukaan terdahadap proses pelayanan, dan mendorong masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari penyelenggaran pelayanan.

1. Bukti Langsung (*Tangibles*)

Pertama yang perlu dilihat adalah mengukur dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti langusung yang dimana dapat sampai dan dirasakan secara langsung terhadap sasaran yaitu masyarakat yang terkena efek parkir liar.

Pada indikator hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup efektif. Dimana terlihat dari beberapa informan baik yang berasal dari masyarakat umum, penerapan strategi yang dijalankan itu bentuk pelayanan yang sudah mendapatkan respon baik dari masyarakat.

Untuk itu berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti berangggapan bahwa bukti langsung terhdapat pelayanan penrtiban parkir liar sudah memiliki nilai hang baik terbukti dari proses pelayanan yang sudah direformasi sedemikian rupa serta fasilitas yang tersediakan membuat masyarakat cukup nyama, usaha yang diwujudkan oleh pihak Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola terhadap pelaku-pelaku parkir liar dinyatakan dalam bentuk pembinaan langsung terhadap para pelaku liar tersebut. Prosedur pembinaan yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan UPTBPP adalah dengan cara memberikan sosialisasi langsung kepada para pelaku parkir liar tentang penertiban parkir liar dilaksanakan oleh pihak terkait.

2. Kehandalan (*Reability*)

Dalam pengukuran dimensi yang kedua ini mengukur bagaimana kesiapan para aktor pelayanan publik dalam hal ini petugas Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar mampu menjawab tantangan-tantangan dari masyarakat baik sebelum hingga sesudah layanan diberikan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan, pihak Dishub dan UPTBPP sudah memberikan pelayanan yang baik didalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut pandangan peneliti, strategi yang dilakukan oleh pihak Dishub dan UPTBPP sudah cukup baik dalam mengayomi masyarakat sebagai aparatur pelayan publik baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun melihat tanggapan masyarakat di lapangan, yang menjadi kelemahan disini adalah dari pihak masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang memiliki kesadaran diri seperti halnya masih menganggap sepele parkir sembarangan sehingga apa yang dilakukan oleh pihak Dishub dan UPTBPP pun akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan dukungan masyarakat itu sendiri. Artinya, dalam hal ini pihak

Dishub dan UPTBPP sudah memberikan pelayanan strategi yang baik tetapi masyarakat itu sendiri yang cenderung pasif.

3. Daya Tanggap (*Responsiveneess*)

Pada indikator ketiga ini ialah daya tanggap mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan pihak Dishub dan UPTBPP mampu merespon permintaan masyarakat serta melayani pengaduan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara, peneliti menemukan suatu kesimpulan bahwa sejumlah strategi yang diterapkan oleh pihak Dishub dan UPTBPP adalah pelayanan yang bukan saja satu arah tetapi juga dua arah, pemanfaatan teknologi dengan tingkat responsivitas yang tinggi dan didukung oleh kualitas SDM yang handal sehingga masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat di jawab dengan baik. Menurut peneliti, daya tanggap dari pihak Dishub dan UPTBPP sudah sangat baik didalam menertibkan parkir liar di pasar Wamanggu. Dilapangan terlihat bahwa petugas Dishub dan UPTBPP khususnya di sangat sigap dalam membantu masyarakat.

4. Jaminan (*Assurance*)

Pada bagian ini yang menjadi faktor dimensi kualitas pelayanan adalah jaminan yang berhubungan dengan kemampuan petugas Dishub dan UPTBPP dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tidak ada pernyataan langsung dari masyarakat yang menyatakan yakin pada pelayanan yang diberikan oleh pihak Dishub dan UPTBPP.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara bahwasanya masih ada beberapa juru parkir liar di area-area pasar wamanggu tertentu yang belum sepenuhnya berada dibawah perlindungan kedinasan, sehingga retribusi ini jelas sudah termasuk pungutan liar yang merugikan masyarakat dan daerah itu sendiri, juga perlu diajarkan kepada masyarakat setiap parkir harus memakai karcis sebagai bukti yang sah atas jasa yang harus dibayarkan tentunya sebaliknya. Dan pihak Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir juga seharusnya bertindak cepat dalam menangani hal ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa strategi jaminan *(assurance)* yang diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan masih belum cukup baik dan masih perlu melakukan peningkatan.

5. Empati (*Emphaty*)

Dalam hal ini yang menjadi ukuran dimensi kualitas pelayanan adalah perhatian personal yang artinya memberikan pelayanan yang lebih bersifat manusiawi berdasarkan hati nurani seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kategori penilaian sttrategi empati menempati posisi yang paling rendah karena bagi masyarakat tidak ada hal yang khusus atau bermakna yang membuat masyarakat terkesan akan pelayanan yang diberikan oleh petugas Dishub dan UPTBPP.

3. Analisis Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke

Pada bagian ini peneliti akan menggunakan model analisis Strategi "SWOT Analisis" dimana untuk mengukur strategi peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan di Kantor Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar wamanggu. Adapun yang dikaji dalam analisis ini yaitu faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternar peluang dan ancaman.

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara peneliti, adapun yang menjadi kekuatan pihak Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar wamanggu dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan SDM yang handal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam

memberikan pelayanan petugas dari Kantor Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar wamanggu yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus bisa bersikap ramah, berpenampilan rapi, enerjik danberpengalaman agar masyarakat merasa puas dan nyaman.

b. Tersedianya gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
c. Sarana dan prasarana yakni segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang menunjang termasuk yang menjadi kebutuhan pegawai dalam bekerja seperti peralatan kantor, komputer, ruangan yang nyaman hingga kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat seperti fasilitas-fasilitas 1 kantor, 1 terminal, 1 tempat uji KIR kendaraan, kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Moenir bahwa Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi itu.
d. Perubahan nyata dari reformasi pelayanan publik

Dalam hal ini perubahan yang nyata adalah strategi program-rogram yang dijalankan yakni;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan yang mencakup kebutuhan administrasi perkantoran dan jasa honorer, Tenaga Harian Lepas (THL).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan ini merupakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibidang perhubungan yang mencakup penyediaan pengadaan dan pemeliharaan rutin.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan ini merupakan peningkatan perlengkapan pakaian kerja untuk peningkatan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas di lapangan dan balai PKB.
4. Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap ASN dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga nantinya mampu meningkatkan kinerjanya.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam memberi laporan hasil kerja terhadap pimpinan.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut pengawasan warung internet dan Menara telekomunikasi (Tower).
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna transportasi yang dilakukan melalui pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan bidang transportasi.
9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan dalam meningkatkan keselamatan masyarakat dijalan dan untuk mengetahui rambu rambu lalu lintas serta pemantauan tingkat kepadatan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis, adapun yang menjadi kelemahan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan;
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin,

pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta yang memiliki kemampuan komputer diatas rata-rata;

c. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
d. Kurangnya prasarana dan sarana jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalulintas.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara peneliti, adapun yang menjadi peluang dari Dinas Perhubungan dan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar wamanggu Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi Efektifitas pelaksanaan tugas akan sangat terdukung dengan polesan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari hari guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi dinas. Media elektronika, manajemen modern dan pengembangan sistem informasi dan manajemen adalah bagian dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang bisa diadopsi oleh lapangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjalin kerjasama dengan Stakeholders
   Masukan berupa kritik dan harapan-harapan yang sejalan dengan gerakan reformasi marak disuarakan dan ditujukan kepada organisasi aparatur pemerintahan pada berbagai tingkatannya, serta komitmen jajaran birokrasi utuk semakin meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dalam melayani kepentingan masyarakat adalah motivasi yang besar bagi terciptanya suatu kerja sama antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan suatu tugas sesuai spesifikasi tugas dimaksud.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif pada sektor transportasi semakin meningkat.
   Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara peneliti, adapun yang menjadi ancaman pihak Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar wamanggu Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut:
1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
3. Modal sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojek;
4. Luasnya wilayah kerja.
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan rasa ikut memiliki fasilitas lalu lintas
6. Persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada.
7. Muncul juru parkir liar
8. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya.

5. P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa data dan pembahasan hasil penelitian dari informan yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat bentuk komunikasi persuasif antara Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu dengan para pelaku parkir liar, yaitu bentuk komunikasi yang bersifat ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi juru parkir liar agar dapat bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh pihak terkait dengan penertiban parkir liar dengan cara mengajak para pelaku parkir liar untuk bergabung

dengan sistem pembinaan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan. Sosialisasi secara langsung di lapangan kepada para pelaku parkir liar merupakan sebuah bentuk pendekatan yang bertujuan untuk mempengaruhi para pelaku parkir liar agar mau dibina oleh pihak Dinas Perhubungan.

2. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu adalah Peran Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu dalam menertibkan parkir liar di Kabupaten Merauke Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu dalam hal penghambat yaitu masih kurangnya lahan parkir dan susahnya merangkul (oknum) jukir liar untuk dijadikan jukir binaan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu.
3. Dimensi kualitas pelayanan yang diukur dari Bukti Langsung *(tangibles)*, Kehandalan *(realbility)*, Daya Tanggap *(responsiveness)*, Jaminan *(assurance)*, Empati *(emphaty)*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa Bukti Langsung, Kehandalan, dan Daya Tanggap mendapat penilaian terbaik dari masyarakat. Sedangkan untuk Jaminan dan Empati kualitas pelayanannya masih rendah dan kurang baik serta kurang mendapat dampak yang signifikan bagi masyarakat.
4. Analasis strategi "*SWOT Analisys*" untuk mengukur strategi peningkatan kualitas pelayanan yang diterapkan di kantor Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke adalah faktor internal yakni kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal peluang dan ancaman.

a. Dalam hal ini yang menjadi kekuatan diantaranya kemampuan SDM yang handal, tersedianya gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya, sarana dan prasarana, dan perubahan nyata dari reformasi pelayanan publik.
b. Kelemahan diantaranya rendahnya disiplin kerja, keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung, kurangnya prasarana dan sarana jalan sebagai pendukung mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalulintas.
c. Peluang diantaranya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, menjalin kerjasama dengan Stakeholders, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif pada sektor transportasi semakin meningkat.

B. Saran

Diharapkan kepada semua pihak baik itu pemerintah, dinas perhubungan, dan juga semua orang yang berkepentingan dalam menanggulangi parkir liar untuk selalu bekerja keras dalam meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada, terus berinovasi, memperbaiki tata cara parkir dan dapat memperhatikan suasana parkir liar untuk menghindari kemacetan diarea sekitarnya.

Ancaman diantaranya rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertibanlalu lintas dan rasa ikut memiliki fasilitas lalu lintas, dan persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta observasi maka pada kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi strategi kepada Kantor Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar bagian Koordinator Parkir di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke untuk menertibkan parkir liar, yaitu:

1. Menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan tindakan sosialisasi untuk penertiban parkir liar Kabupaten Merauke dan UPTD Pasar Wamanggu. Sehingga kegiatan parkir liar dapat ditertibkan dengan baik.

2. Kepada Dinas Perhubungan agar tindakan persuasif lebih dilakukan secara intensif, sehingga kepercayaan dari para pelaku parkir liar lebih terbangun.
3. Menyarankan juga kepada juru parkir liar agar mau untuk dibina oleh Dinas Perhubungan, guna memperbaiki sistem pengelolaan parkir yang ada.
4. Diharapkan juga kepada setiap petugas parkir yang ada dilapangan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan di lokasi parkir.